LAPORAN MONEV TAHUN 2024

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargaai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

3. Tujuan

Berdasarkan misi di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional.

4. Sasaran

a) Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik
b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, hukum dan pembangunan
c) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
d) Berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik
e) Meningkatnya sarana dan prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Program dan Kegiatan

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.348.599.408.018,- *(Tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 314.285.854.774**

- *Belanja Pegawai : Rp. 79.481.825.968*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 199.145.687.806*
- *Belanja Hibah : Rp. 35.658.341.000*

Belanja Modal : **Rp. 34.313.553.244**

Belanja langsung tersebut terdiri atas 8 Program, 31 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
l. Fasilitasi Keprotokolan

2) Program penataan organisasi
   a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3) Program pemerintahan dan otonomi daerah
   a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
   b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
   c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
4) Program kesejahteraan rakyat
   a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
   b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
   c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
5) Program fasilitasi dan koordinasi hukum
   a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum
6) Program perekonomian dan pembangunan
   a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
7) Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
8) Program kebijakan administrasi pembangunan
   a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6. Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov. Sumsel
2) Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Penyampaian LKPJ dan LPPD Pemprov. Sumsel yang tepat waktu
4) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
5) Laporan kinerja Pemerintah Prov. Sumsel yang dapat diakses publik
6) Jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh Publik

7) Jumlah Informasi Pembangunan yang di Upload
8) Survei Kepuasan Masyarakat
9) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
10) Jumlah nominasi Provinsi yang mendapat Penghargaan Abdibaktitani dari Menteri Pertanian
11) Usulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov.Sumsel ke KemenPAN dan RB R
12) Persentase pelayanan kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP
13) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis
14) Jumlah perkara Pemprov. Sumsel yang selesai
15) Persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
16) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
17) Jumlah pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi
18) Jumlah batas wilayah administrasi antar daerah yang difasilitasi
19) Jumlah lokasi yang dibakukan nama unsur Rupabuminya
20) Jumlah Kabupaten pemekaran yang telah memiliki infrastruktur sesuai standar
21) Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah
22) Luas lahan yang dibebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum
23) Persentase fasilitasi kebijakan Pemerintah sesuai dengan SOP
24) Persentase masyarakat penerima beras miskin yang diberik+an tepat sasaran
25) Jumlah perusahaan yang telah memperoleh izin (Bidang angkutan, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan)
26) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Peraturan pemberian izin bidang Transportasi dan Bidang Perindustrian
27) Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
28) Persentase pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Selatan
29) Rangking pemenang Qasidah Robana Tingkat Nasional
30) Rangking Pemenang MTQ/STQ Tingkat Nasional
31) Rangking I UKS Tingkat Nasional
32) Jumlah Kab/Kota yang memiliki administrasi pembangunan sesuai standar
33) Jumlah Kab/Kota yang berhasil dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
34) Persentase SKPD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
35) Persentase SKPD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
36) Persentase SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP
37) Persentase pelaksanaan SPM Provinsi
38) Persentase laporan penyelenggaraan PTSP
39) Persentase Pelaksanaan Tata Naskah Dinas yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
40) Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (80%)
41) Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu
42) Persentase fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

7. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan sebagian besar di Kota Palembang dan sebagian lainnya di Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bulan Maret ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**348.599.408.018,00**	**47.276.707.756,00**	**30**	**13,56**	**100**	**30**
Belanja Operasi	**314.285.854.774,00**	**37.434.132.219,00**	**30**	**11,91**	**100**	**20**
- Belanja Pegawai	79.481.825.968,00	14.552.603.211,00	30	18,31	100	20
- Belanja Barang Jasa	199.145.687.806,00	22.881.529.008,00	30	11,49	100	20
- Belanja Hibah	35.658.341.000,00	0,00	30	0,00	100	0
Belanja Modal	**34.313.553.244,00**	**9.842.575.537,00**	**30**	**28,68**	**100**	**35**

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.47.276.707.756,00 atau 13,51 dan realisasi fisik 30%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.37.434.132.219,00 atau 11,91% dan realisasi fisik 20%.

3) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.9.842.575.537,00 atau 35% dan realisasi fisik 100%.

ii. Realisasi Keuangan

Secara umum realisasi keuangan program kegiatan per 31 Maret 2024 baru terealisasi 13,56%.

iii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per per 31 Maret 2024 baru terealisasi sebesar 25%.

b) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja OPD Tahun 2024 berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s/d 2023 per 31 Maret 2023 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	A (Sangat Tinggi)	3,4811	116,04
2	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara	%	100	100	100
3	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai	13	11,86	91,23
4	Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	%	100	90	90
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (84)	B (69,14)	82,31
6	Nilai Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (81,26)	A (90,52)	111,40
7	Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD	%	100	80	80
8	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100%	88,60	88,60
9	Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronil (LPSE)	%	100%	192,16	192,16
10	Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	-	-
11	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang	Pilar	60	-	-
12	Jumlah Memorandum of Undertanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen Mou	45	21	46,67
14	Persentase Data Informasi	%	100%	100	100

	Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia				
15	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100	95,91	95,91
16	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang efektif	%	100	100	100
17	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	-	-	-
18	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	15	3	500
19	Persentase PD yang telah memliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
20	Persentase PD yang telah menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	90	100	111,11
21	Presentase Pelaksanaan SPM Provinsi	%	100	79,66	79,66
22	Presentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97	97	100
23	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang optimal	%	100	91	91,00

c) Capaian Keberhasilan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah dapat melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan prima menuju tata pemerintahan yang baik.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya

volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargaai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

3. Tujuan

Berdasarkan misi di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional.

4. Sasaran

a) Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik
b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, hukum dan pembangunan
c) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
d) Berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik
e) Meningkatnya sarana dan prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Program dan Kegiatan

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.348.599.408.018,- *(Tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 314.285.854.774**

- *Belanja Pegawai : Rp. 79.481.825.968*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 199.145.687.806*
- *Belanja Hibah : Rp. 35.658.341.000*

Belanja Modal : **Rp. 34.313.553.244**

Belanja langsung tersebut terdiri atas 8 Program, 31 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
l. Fasilitasi Keprotokolan

2) Program penataan organisasi
   a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3) Program pemerintahan dan otonomi daerah
   a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
   b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
   c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
4) Program kesejahteraan rakyat
   a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
   b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
   c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
5) Program fasilitasi dan koordinasi hukum
   a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum
6) Program perekonomian dan pembangunan
   a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
7) Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
8) Program kebijakan administrasi pembangunan
   a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6. Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov. Sumsel
2) Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Penyampaian LKPJ dan LPPD Pemprov. Sumsel yang tepat waktu
4) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
5) Laporan kinerja Pemerintah Prov. Sumsel yang dapat diakses publik
6) Jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh Publik

7) Jumlah Informasi Pembangunan yang di Upload
8) Survei Kepuasan Masyarakat
9) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
10) Jumlah nominasi Provinsi yang mendapat Penghargaan Abdibaktitani dari Menteri Pertanian
11) Usulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov.Sumsel ke KemenPAN dan RB R
12) Persentase pelayanan kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP
13) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis
14) Jumlah perkara Pemprov. Sumsel yang selesai
15) Persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
16) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
17) Jumlah pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi
18) Jumlah batas wilayah administrasi antar daerah yang difasilitasi
19) Jumlah lokasi yang dibakukan nama unsur Rupabuminya
20) Jumlah Kabupaten pemekaran yang telah memiliki infrastruktur sesuai standar
21) Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah
22) Luas lahan yang dibebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum
23) Persentase fasilitasi kebijakan Pemerintah sesuai dengan SOP
24) Persentase masyarakat penerima beras miskin yang diberik+an tepat sasaran
25) Jumlah perusahaan yang telah memperoleh izin (Bidang angkutan, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan)
26) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Peraturan pemberian izin bidang Transportasi dan Bidang Perindustrian
27) Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
28) Persentase pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Selatan
29) Rangking pemenang Qasidah Robana Tingkat Nasional
30) Rangking Pemenang MTQ/STQ Tingkat Nasional
31) Rangking I UKS Tingkat Nasional
32) Jumlah Kab/Kota yang memiliki administrasi pembangunan sesuai standar
33) Jumlah Kab/Kota yang berhasil dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
34) Persentase SKPD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
35) Persentase SKPD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
36) Persentase SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP
37) Persentase pelaksanaan SPM Provinsi
38) Persentase laporan penyelenggaraan PTSP
39) Persentase Pelaksanaan Tata Naskah Dinas yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
40) Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (80%)
41) Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu
42) Persentase fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

7. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan sebagian besar di Kota Palembang dan sebagian lainnya di Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bulan Juni ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**348.599.408.018,00**	**118.135.365.630,37**	**50**	**33,89**	**100**	**50**
Belanja Operasi	**314.285.854.774,00**	**105.689.723.682,37**	**50**	**33,63**	**100**	**40**
- Belanja Pegawai	79.481.825.968,00	35.408.659.585,00	50	44,55	100	50
- Belanja Barang Jasa	199.145.687.806,00	64.156.064.097,37	50	32,22	100	40
- Belanja Hibah	35.658.341.000,00	6.125.000.000,00	50	17,18	100	20
Belanja Modal	**34.313.553.244,00**	**105.689.723.682,37**	**50**	**36,27**	**100**	**40**

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.118.135.365.630,37 atau 33,89 dan realisasi fisik 50%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.105.689.723.682,37 atau 33,63% dan realisasi fisik 40%.

3) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.105.689.723.682,37 atau 36,27% dan realisasi fisik 100%.

ii. Realisasi Keuangan

Secara umum realisasi keuangan program kegiatan per 31 Juni 2024 baru terealisasi 33,89%.

iii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per per 31 Juni 2024 baru terealisasi sebesar 50%.

b) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja OPD Tahun 2024 berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s/d 2023 per 31 Juni 2024 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	A (Sangat Tinggi)	3,4811	116,04
2	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara	%	100	100	100
3	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai	13	11,86	91,23
4	Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	%	100	90	90
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (84)	B (69,14)	82,31
6	Nilai Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (81,26)	A (90,52)	111,40
7	Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD	%	100	80	80
8	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100%	88,60	88,60
9	Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronil (LPSE)	%	100%	192,16	192,16
10	Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	-	-
11	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang	Pilar	60	-	-
12	Jumlah Memorandum of Undertanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen Mou	45	21	46,67
14	Persentase Data Informasi	%	100%	100	100

	Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia				
15	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100	95,91	95,91
16	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang efektif	%	100	100	100
17	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	-	-	-
18	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	15	3	500
19	Persentase PD yang telah memliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
20	Persentase PD yang telah menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	90	100	111,11
21	Presentase Pelaksanaan SPM Provinsi	%	100	79,66	79,66
22	Presentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97	97	100
23	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang optimal	%	100	91	91,00

c) Capaian Keberhasilan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah dapat melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan prima menuju tata pemerintahan yang baik.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya

volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargaai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

3. Tujuan

Berdasarkan misi di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional.

4. Sasaran

a) Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik
b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, hukum dan pembangunan
c) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
d) Berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik
e) Meningkatnya sarana dan prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Program dan Kegiatan

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.348.599.408.018,- *(Tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 314.285.854.774**

- *Belanja Pegawai : Rp. 79.481.825.968*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 199.145.687.806*
- *Belanja Hibah : Rp. 35.658.341.000*

Belanja Modal : **Rp. 34.313.553.244**

Belanja langsung tersebut terdiri atas 8 Program, 31 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
l. Fasilitasi Keprotokolan

2) Program penataan organisasi
   a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3) Program pemerintahan dan otonomi daerah
   a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
   b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
   c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
4) Program kesejahteraan rakyat
   a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
   b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
   c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
5) Program fasilitasi dan koordinasi hukum
   a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum
6) Program perekonomian dan pembangunan
   a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
7) Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
8) Program kebijakan administrasi pembangunan
   a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6. Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov. Sumsel
2) Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Penyampaian LKPJ dan LPPD Pemprov. Sumsel yang tepat waktu
4) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
5) Laporan kinerja Pemerintah Prov. Sumsel yang dapat diakses publik
6) Jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh Publik

7) Jumlah Informasi Pembangunan yang di Upload
8) Survei Kepuasan Masyarakat
9) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
10) Jumlah nominasi Provinsi yang mendapat Penghargaan Abdibaktitani dari Menteri Pertanian
11) Usulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov.Sumsel ke KemenPAN dan RB R
12) Persentase pelayanan kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP
13) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis
14) Jumlah perkara Pemprov. Sumsel yang selesai
15) Persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
16) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
17) Jumlah pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi
18) Jumlah batas wilayah administrasi antar daerah yang difasilitasi
19) Jumlah lokasi yang dibakukan nama unsur Rupabuminya
20) Jumlah Kabupaten pemekaran yang telah memiliki infrastruktur sesuai standar
21) Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah
22) Luas lahan yang dibebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum
23) Persentase fasilitasi kebijakan Pemerintah sesuai dengan SOP
24) Persentase masyarakat penerima beras miskin yang diberik+an tepat sasaran
25) Jumlah perusahaan yang telah memperoleh izin (Bidang angkutan, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan)
26) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Peraturan pemberian izin bidang Transportasi dan Bidang Perindustrian
27) Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
28) Persentase pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Selatan
29) Rangking pemenang Qasidah Robana Tingkat Nasional
30) Rangking Pemenang MTQ/STQ Tingkat Nasional
31) Rangking I UKS Tingkat Nasional
32) Jumlah Kab/Kota yang memiliki administrasi pembangunan sesuai standar
33) Jumlah Kab/Kota yang berhasil dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
34) Persentase SKPD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
35) Persentase SKPD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
36) Persentase SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP
37) Persentase pelaksanaan SPM Provinsi
38) Persentase laporan penyelenggaraan PTSP
39) Persentase Pelaksanaan Tata Naskah Dinas yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
40) Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (80%)
41) Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu
42) Persentase fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

7. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan sebagian besar di Kota Palembang dan sebagian lainnya di Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bulan September ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**348.599.408.018,00**	**216.568.142.825,49**	**75**	**62,13**	**100**	**67**
Belanja Operasi	**314.285.854.774,00**	**196.478.765.770,49**	75	**62,52**	**100**	**70**
- Belanja Pegawai	79.481.825.968,00	51.677.028.808,00	75	65,02	100	70
- Belanja Barang Jasa	199.145.687.806,00	116.943.395.962,49	75	58,72	100	60
- Belanja Hibah	35.658.341.000,00	27.858.341.000,00	75	78,13	100	80
Belanja Modal	**34.313.553.244,00**	**20.089.377.055,00**	75	**62,52**	**100**	**65**

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.216.568.142.825,49 atau 62,13 dan realisasi fisik 67%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.196.478.765.770,49 atau 62,52% dan realisasi fisik 70%.

3) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.20.089.377.055,00 atau 58,55% dan realisasi fisik 65%.

ii. Realisasi Keuangan

Secara umum realisasi keuangan program kegiatan per 31 September 2024 baru terealisasi 62,52%.

iii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per per 31 September 2024 baru terealisasi sebesar 67%.

b) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja OPD Tahun 2024 berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s/d 2023 per 31 September 2024 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	A (Sangat Tinggi)	3,4811	116,04
2	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara	%	100	100	100
3	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai	13	11,86	91,23
4	Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	%	100	90	90
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (84)	B (69,14)	82,31
6	Nilai Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (81,26)	A (90,52)	111,40
7	Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD	%	100	80	80
8	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100%	88,60	88,60
9	Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronil (LPSE)	%	100%	192,16	192,16
10	Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	-	-
11	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang	Pilar	60	-	-
12	Jumlah Memorandum of Undertanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUM	Dokumen Mou	45	21	46,67

	ND dan Lembaga Non Pemerintah				
14	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	100%	100	100
15	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100	95,91	95,91
16	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang efektif	%	100	100	100
17	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	-	-	-
18	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	15	3	500
19	Persentase PD yang telah memliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
20	Persentase PD yang telah menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	90	100	111,11
21	Presentase Pelaksanaan SPM Provinsi	%	100	79,66	79,66
22	Presentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97	97	100
23	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang optimal	%	100	91	91,00

c) Capaian Keberhasilan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah dapat melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan prima menuju tata pemerintahan yang baik.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.

2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargaai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

3. Tujuan

Berdasarkan misi di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional.

4. Sasaran

a) Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik
b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, hukum dan pembangunan
c) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
d) Berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik
e) Meningkatnya sarana dan prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Program dan Kegiatan

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.348.599.408.018,- *(Tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 314.285.854.774**

- *Belanja Pegawai : Rp. 79.481.825.968*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 199.145.687.806*
- *Belanja Hibah : Rp. 35.658.341.000*

Belanja Modal : **Rp. 34.313.553.244**

Belanja langsung tersebut terdiri atas 8 Program, 31 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
l. Fasilitasi Keprotokolan

2) Program penataan organisasi
   a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3) Program pemerintahan dan otonomi daerah
   a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
   b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
   c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
4) Program kesejahteraan rakyat
   a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
   b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
   c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
5) Program fasilitasi dan koordinasi hukum
   a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum
6) Program perekonomian dan pembangunan
   a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
7) Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
8) Program kebijakan administrasi pembangunan
   a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6. Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov. Sumsel
2) Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Penyampaian LKPJ dan LPPD Pemprov. Sumsel yang tepat waktu
4) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
5) Laporan kinerja Pemerintah Prov. Sumsel yang dapat diakses publik
6) Jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh Publik

7) Jumlah Informasi Pembangunan yang di Upload
8) Survei Kepuasan Masyarakat
9) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
10) Jumlah nominasi Provinsi yang mendapat Penghargaan Abdibaktitani dari Menteri Pertanian
11) Usulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov.Sumsel ke KemenPAN dan RB R
12) Persentase pelayanan kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP
13) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis
14) Jumlah perkara Pemprov. Sumsel yang selesai
15) Persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
16) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
17) Jumlah pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi
18) Jumlah batas wilayah administrasi antar daerah yang difasilitasi
19) Jumlah lokasi yang dibakukan nama unsur Rupabuminya
20) Jumlah Kabupaten pemekaran yang telah memiliki infrastruktur sesuai standar
21) Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah
22) Luas lahan yang dibebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum
23) Persentase fasilitasi kebijakan Pemerintah sesuai dengan SOP
24) Persentase masyarakat penerima beras miskin yang diberik+an tepat sasaran
25) Jumlah perusahaan yang telah memperoleh izin (Bidang angkutan, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan)
26) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Peraturan pemberian izin bidang Transportasi dan Bidang Perindustrian
27) Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
28) Persentase pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Selatan
29) Rangking pemenang Qasidah Robana Tingkat Nasional
30) Rangking Pemenang MTQ/STQ Tingkat Nasional
31) Rangking I UKS Tingkat Nasional
32) Jumlah Kab/Kota yang memiliki administrasi pembangunan sesuai standar
33) Jumlah Kab/Kota yang berhasil dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
34) Persentase SKPD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
35) Persentase SKPD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
36) Persentase SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP
37) Persentase pelaksanaan SPM Provinsi
38) Persentase laporan penyelenggaraan PTSP
39) Persentase Pelaksanaan Tata Naskah Dinas yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
40) Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (80%)
41) Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu
42) Persentase fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

7. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan sebagian besar di Kota Palembang dan sebagian lainnya di Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bulan Desember ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**355.812.016.872,00**	**327.713.037.346,71**	**100**	**92,10**	**100**	**100**
Belanja Operasi	**319.778.463.628,00**	**293.086.919.482,71**	100	**91,65**	**100**	**100**
- Belanja Pegawai	78.110.843.832,00	71.228.972.718,00	100	91,19	100	100
- Belanja Barang Jasa	206.429.278.796,00	186.755.492.003,71	100	90,47	100	100
- Belanja Hibah	35.238.341.000,00	34.653.454.761,00	100	99,61	100	100
Belanja Modal	**36.033.553.244,00**	**34.626.117.864,00**	**100**	**96,09**	**100**	**100**

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.327.713.037.346,71 atau 92,10% dan realisasi fisik 100%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.319.778.463.628,00 atau 91,65% dan realisasi fisik 100%.

3) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan DesemberTahun Anggaran 2024 sebesar Rp.36.033.553.244,00 atau 92,10% dan realisasi fisik 100%.

ii. Realisasi Keuangan

Secara umum realisasi keuangan program kegiatan per 31 Desember 2024 baru terealisasi 92,10%.

iii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per per 31 Desmeber 2024 terealisasi sebesar 100%.

b) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja OPD Tahun 2024 berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	A (Sangat Tinggi)	3,4811	116,04
2	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara	%	100	100	100
3	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai	13	11,86	91,23
4	Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	%	100	90	90
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (84)	B (69,14)	82,31
6	Nilai Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (81,26)	A (90,52)	111,40
7	Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD	%	100	80	80
8	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	%	100%	88,60	88,60
9	Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronil (LPSE)	%	100%	192,16	192,16
10	Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	-	-
11	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang	Pilar	60	-	-
12	Jumlah Memorandum of Undertanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen Mou	45	21	46,67
14	Persentase Data Informasi	%	100%	100	100

	Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia				
15	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100	95,91	95,91
16	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang efektif	%	100	100	100
17	Meningkatnya Peringkat MTQ	Besar	-	-	-
18	Meningkatnya Peringkat STQ	Besar	15	3	500
19	Persentase PD yang telah memliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
20	Persentase PD yang telah menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	90	100	111,11
21	Presentase Pelaksanaan SPM Provinsi	%	100	79,66	79,66
22	Presentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	%	97	97	100
23	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang optimal	%	100	91	91,00

c) Capaian Keberhasilan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah dapat melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan prima menuju tata pemerintahan yang baik.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya

volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
					(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**1.664.364.000**	50,00	93,12	**1.549.897.762**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**716.214.805**	50,00	87,19	**624.456.442**	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		100,00		**80,00**	**40,06**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	247.015.210	50,00	87,48	216.094.199	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	100,00	-	80,00	11,87	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	70.000.000	50,00	94,41	66.085.281	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	100,00	-	100,00	4,21	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	115.000.000	50,00	80,27	92.305.719	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	100,00	-	100,00	6,91	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	284.199.595	50,00	87,96	249.971.243	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	100,00	-	100,00	17,08	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**948.149.195**	50,00	97,61	**925.441.320**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		100,00		**70,00**	**15,47**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	866.149.195	50,00	99,72	863.733.665	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	100,00	15%	25,00	13,01	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	82.000.000	50,00	75,25	61.707.655	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	100,00	-	50,00	2,46	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN**	**4.265.000.000**	50,00	94,94	**4.049.258.465**	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**70,00**	**70,00**	
1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.130.000.000**	50,00	95,91	**1.083.826.070**	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**60,00**	**10,23**	

7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	185.000.000	50,00	85,26	157.731.670	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	0	25,00	1,08	Palembang
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	780.000.000	50,00	97,64	761.582.243	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00	0	50,00	9,14	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	165.000.000	50,00	99,70	164.512.157	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00		40,00	11,82	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Rp 1.125.000.000**	50,00	142,69	**1.027.389.488**	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	100,00	3 bulan	70,00	11,82	Palembang
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp 720.000.000	50,00	88,67	638.441.978	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		100,00		**0,00**	**2,46**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 195.000.000	50,00	97,49	190.109.976	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	30,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 210.000.000	50,00	94,68	198.837.534	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	50,00	2,46	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp 2.010.000.000**	50,00	96,42	**1.938.042.907**	Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		100,00		80,00		
14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 720.000.000	50,00	93,97	676.593.107	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	100,00	-	70,00	124,51	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 275.000.000	50,00	95,06	261.410.731	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	100,00	-	80,00	28,21	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang da	Rp 1.015.000.000	50,00	98,53	1.000.039.069	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	80,00	492,12	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Rp 750.000.000**	50,00	74,14	**556.075.167**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		100,00		**60,00**	**60,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 420.000.000**	50,00	73,83	**310.066.933**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		100,00	0	**40,00**	**22,53**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 200.000.000	50,00	69,75	139.494.595	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	100,00	0%	35,00	9,33	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 110.000.000	50,00	63,54	69.888.601	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	100,00	0%	40,00	5,87	Palembang

19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 110.000.000	50,00	91,53	100.683.737	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	100,00	0%	50,00	7,33	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 330.000.000**	50,00	74,55	**246.008.234**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		100,00		**35,00**	**15,40**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 110.000.000	50,00	53,79	59.167.570	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100,00	0	30,00	4,40	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 110.000.000	50,00	76,06	83.661.780	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	100,00	0	35,00	5,13	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp 110.000.000	50,00	93,80	103.178.884	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	100,00	0	40,00	5,87	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Rp 22.522.646.423**	50,00	98,65	**22.218.918.495**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		100,00		**100,00**	**100,00**	
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Rp 1.250.000.000**	50,00	96,96	1.212.003.447	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		100,00		**60,00**	**3,35**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp 650.000.000	50,00	94,59	614.830.019	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	70,00	2,02	75 Kecamatan di Prov.Sumsel
24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	Rp 600.000.000	50,00	99,53	597.173.428	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	100,00	0	50,00	1,33	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Rp 2.911.232.000**	50,00	94,09	2.739.257.140	Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan		100,00	0	60,00	8,51	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 1.210.000.000	50,00	86,14	1.042.340.098	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	60,00	3,22	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.701.232.000	50,00	99,75	1.696.917.042	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100,00	0	70,00	5,29	Kab/Kota di Prov.Sumsel

3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Rp 18.361.414.423**	50,00	99,49	**18.267.657.908**	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)		100,00		100,00	81,52	Palembang
27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	18.361.414.423,00	50,00	99,49	18.267.657.908,00	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	100,00	20%	100,00	81,52	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Rp 2.288.462.500**	50,00	88,82	**2.032.546.738**	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Rp 863.424.000**	50,00	89,08	**769.103.620**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		100,00		**35,00**	**12,65**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp 557.924.000	50,00	92,48	515.946.944	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	100,00	0	30,00	7,31	Palembang
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 305.500.000	50,00	82,87	253.156.676	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	100,00	0	40,00	5,34	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Rp 546.553.500**	50,00	94,20	**514.841.314**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		100,00		**50,00**	**5,43**	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	Rp 177.469.250	50,00	98,86	175.441.162	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	100,00	0	70,00	5,43	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	270.100.000	50,00	89,01	240.415.902	Jumlah dokumen data dan informasi tentang pertambahan dan lingkungan	1 dokumen 1 pameran	101,00	1	30,00	9,38	Palembang
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 98.984.250	50,00	100,00	98.984.250	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	100,00	0	100,00	11,46	Palembang
3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**Rp 878.485.000**	50,00	85,22	**748.601.804**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		100,00		**50,00**	**12,49**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp 157.600.000	50,00	83,45	131.513.444			100,00		**70,00**		
2	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Rp 149.400.000	50,00	81,40	121.612.718			100,00		**40,00**		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp 571.485.000	50,00	86,70	495.475.642	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD	1 Raperda 10 buku laporan	100,00	0	50,00	12,49	Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Rp 1.081.860.000**	50,00	87,54	**947.093.658**	Terlaksananya program penataan organisasi		100,00		**50,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Rp 330.000.000**	50,00	91,12	**300.683.357**	Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		100,00		**60,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	Rp 80.000.000	50,00	98,23	78.585.094	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	100,00	0	70,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	50,00	84,73	67.781.466	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	100,00	0	45,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	Rp 170.000.000	50,00	90,77	154.316.797	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	100,00	0	60,00		Palembang
2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**Rp 751.860.000**	50,00	85,97	**646.410.301**	Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		100,00		**50,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 110.000.000	50,00	92,44	101.689.313	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100,00	0	40,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 321.860.000	50,00	73,38	236.176.141	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	100,00	0	25,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 100.000.000	50,00	98,46	98.463.180	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	100,00	0	60,00		Palembang

39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp	120.000.000	50,00	92,20	110.639.876	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	100,00	0	75,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	100.000.000	50,00	99,44	99.441.791	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	100,00	0	75,00		49 PD per Kab/Kota
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Rp**	**285.901.749.749**	50,00	91,22	**260.796.350.356**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		100,00		**70,00**	**70,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp**	**617.944.400**	50,00	53,89	**332.996.787**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100,00		**50,00**	**0,08**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	93.800.000	50,00	51,33	48.151.050	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	25%	25,00	0,01	Palembang
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,96	38.484.850	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,78	38.416.025	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,97	38.489.450	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,87	38.449.900	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	66.000.000	50,00	99,92	65.950.027	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	100,00	0	70,00	0,02	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	304.144.400	50,00	21,39	65.055.485	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	100,00	0	25,00	0,03	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**69.547.493.032**	50,00	92,43	**64.283.206.281**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		100,00		**70,00**	**16,85**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	67.032.811.532	50,00	92,90	62.271.789.618	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	100,00	3 bulan	70,00	16,41	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	2.514.681.500	50,00	77,80	1.956.521.180,00	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	50,00	0,44	Palembang
52	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp	25.000.000	50,00	99,72	24.930.750	Honorarium verifikator keuangan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	60,00	2,43	Palembang
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	30.000.000	50,00	0,00	-	penyusunan laporan keu akhir tahun skpd	12 Dokumen	100,00	3 bulan	10,00	3,20	Palembang
54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	Rp	30.000.000	50,00	99,88	29.964.733	penyusunan laporan keu bulanan/semester	12 Dokumen	100,00	3 bulan	10,00	7,79	Palembang
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.880.000.000**	50,00	93,35	**1.754.933.169**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**		100,00		**25,00**	**0,10**	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1.650.000.000	50,00	95,82	1.581.018.069	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100,00	0	10,00	0,06	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	130.000.000	50,00	75,83	98.575.900	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	100,00	60%	40,00	0,02	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	100.000.000	50,00	75,34	75.339.200	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	100,00	0	60,00	0,02	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.843.816.986**	50,00	81,75	**1.507.336.969**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		100,00		**30,00**	**0,19**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	1.220.051.626	50,00	97,56	1.190.294.000	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	100,00	10%	25,00	0,11	Palembang

56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	100.000.000	50,00	93,12	93.121.969	Jumlah dokumen yang di update data kepegawaiannya di lingkup Setda Prov.Sumsel Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov.Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	60,00	0,02	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	423.765.360	50,00	34,31	145.391.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	100,00	0	25,00	0,04	Palembang
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	100.000.000	50,00	78,53	78.530.000	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	100,00	0	65,00	0,02	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**33.881.089.907**	50,00	84,35	**28.579.905.179**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		**50,00**	**264,00**	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	900.000.000	50,00	92,93	836.340.246	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	100,00	3 bulan	70,00	0,22	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	3.119.183.100	50,00	72,81	2.271.066.231	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	100,00	3 bulan	30,00	0,33	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	542.548.440	50,00	99,74	541.127.750	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100,00	0	80,00	0,15	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	14.949.200.000	50,00	90,27	13.494.196.196	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	100,00	3 bulan	50,00	2,61	Palembang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Rp	2.000.000.000	50,00	98,85	1.976.955.540	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	2 kegiatan	101,00	4 bulan	80,00	258,92	Palembang
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	11.970.158.367	50,00	74,89	8.964.196.566	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	100,00	10%	40,00	1,67	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	400.000.000	50,00	99,31	397.221.550	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	100,00	10%	60,00	0,08	Palembang
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Rp	98.801.100	50,00	100,00	98.801.100	Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Dokumen	101,00	10%	61,00	9,75	Palembang
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**Rp**	**20.693.992.150**	50,00	94,08	**19.469.258.500**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	100,00		75,00	13,56	Palembang
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	4.850.000.000	50,00	92,29	4.475.860.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	100,00	0	100,00	1,70	Palembang
70	Pengadaan Mebel	Rp	2.530.000.000	50,00	98,64	2.495.677.000	Pembelian Meubeler	20 Paket	100,00	10%	10,00	0,09	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	13.313.992.150	50,00	93,87	12.497.721.500	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	100,00	10%	70,00	3,26	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**48.699.264.100**	50,00	85,35	**41.565.356.486**		150 jenis	100,00	10%	50,00	8,52	Palembang
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	280.000.000	50,00	92,08	257.822.000	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	100,00	20%	75,00	18,31	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	11.550.000.000	50,00	62,78	7.250.644.383	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	100,00	20%	50,00	2,02	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	17.700.000.000	50,00	97,52	17.260.902.300	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,00	10%	75,00	4,64	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	19.169.264.100	50,00	87,62	16.795.987.803	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	100,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	50,00	3,35	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera**	**Rp**	**47.400.020.374**	50,00	94,06	**44.583.215.569**	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		**50,00**	8,29	Palembang
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan F	Rp	284.000.000	50,00	75,33	213.949.980	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	100,00	10	20,00	**14,40**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	10.983.074.300	50,00	82,91	9.106.256.675	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	100,00	10	40,00	1,54	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	Rp	800.000.000	50,00	93,27	746.131.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	100,00	10%	100,00	0,28	Palembang
80	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp	40.000.000	50,00	100,00	40.000.000	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Paket	101,00	10%	61,00	3,95	Palembang

82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 33.105.126.122	50,00	98,04	32.457.574.544	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	100,00	10	50,00	5,79	Palembang
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan	Rp 2.187.819.952	50,00	92,30	2.019.303.370	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	100,00	20	70,00	0,54	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepa**	**Rp 10.687.175.800**	50,00	85,24	**9.109.823.100**	Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		100,00	25%	60,00	2,24	Palembang
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 253.933.000	50,00	26,02	-	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		100,00		**70,00**	0,06	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.100.000.000	50,00	99,83	2.096.330.000	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	100,00	10	100,00	**7,06**	
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Rp 8.322.217.800	50,00	84,27	7.013.493.100	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	100,00	0	60,00	1,75	Palembang
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 11.025.000	50,00	0,00	-	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Rp 11.450.000.000**	50,00	96,60	**11.060.345.312**	Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah	1 kegiatan	100,00	0	70,00	2,80	Palembang
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 10.250.000.000	50,00	97,67	10.011.210.653	Kebutuhan KDH	100%	100,00	10%	70,00	2,51	Palembang
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp 1.200.000.000	50,00	87,43	1.049.134.659	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	100,00	10%	60,00	0,25	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp 30.775.953.000**	50,00	99,28	**30.555.693.897**	Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100,00	10%	90,00	9,69	Palembang
91	Penyiapan Materi Pimpinan	Rp 2.525.000.000	50,00	98,96	2.498.794.617	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	100,00	25%	80,00	0,71	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 3.237.000.000	50,00	99,09	3.207.405.143	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	20%	90,00	**10,73**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Rp 25.013.953.000	50,00	99,34	24.849.494.137	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	100,00	5%	90,00	7,87	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Rp 8.425.000.000**	50,00	94,89	**7.994.279.107**	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan		100,00		**60,00**	1,77	Palembang
94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Rp 5.200.000.000	50,00	95,77	4.979.999.477	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	30%	60,00	1,09	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.725.000.000	50,00	92,96	2.533.059.350	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	100,00	20%	60,00	**15,64**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Rp 500.000.000	50,00	96,24	481.220.280	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	100,00	0	100,00	0,17	Palembang

VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rp 37.337.934.200**	50,00	95,25	**35.562.896.706**	Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	100,00	0	60,00	7,84	Palembang
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Rp 36.361.934.200**	50,00	95,46	**34.712.400.123**	Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual		100,00		**60,00**	7,63	Palembang
97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp 17.405.000.000	50,00	98,86	17.206.729.483	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	27,97	Kab/Kota di Prov.Sumsel
97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp 18.956.934.200	50,00	92,34	17.505.670.640	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	30,46	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Rp 517.000.000**	50,00	92,77	**479.613.365**	Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar		100,00		**60,00**	**0,74**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp 77.000.000	50,00	91,52	70.471.348	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	100,00	0	0,00	0,00	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp 165.000.000	50,00	97,68	161.168.437	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	100,00	0,74	Palembang
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp 275.000.000	50,00	90,17	247.973.580			100,00		50		
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Rp 459.000.000**	50,00	80,80	**370.883.218**	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		100,00		**70,00**	**0,74**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 275.000.000	50,00	72,21	198.571.254	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	100,00	0	100,00	0,74	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	Rp 77.000.000		92,72	71.391.730	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100,00	0	50,00	y	Palembang
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Rp 107.000.000	50,00	94,32	100.920.234	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	100,00	0	70,00	0,43	
	Jumlah 103 Kegiatan	**Rp 355.812.016.872**		**92,10**	**Rp 327.713.037.347**					**72,00**		

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
					(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**1.911.364.000**	50,00	40,40	**772.270.314**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**716.214.805**	50,00	77,04	**551.747.105**	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		100,00		**80,00**	**34,89**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	247.015.210	50,00	67,19	165.974.605	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	100,00	-	80,00	10,34	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	70.000.000	50,00	85,98	60.189.332	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	100,00	-	100,00	3,66	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	115.000.000	50,00	80,27	92.305.719	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	100,00	-	100,00	6,02	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	284.199.595	50,00	82,08	233.277.449	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	100,00	-	100,00	14,87	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.195.149.195**	50,00	18,45	**220.523.209**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		100,00		**70,00**	**16,94**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.095.149.195	50,00	15,76	172.557.697	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	100,00	15%	25,00	14,32	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100.000.000	50,00	47,97	47.965.512	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	100,00	-	50,00	2,62	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN**	**4.350.000.000**	50,00	56,51	**2.458.397.144**	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**70,00**	**70,00**	
1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.300.000.000**	50,00	48,60	**631.808.950**	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**60,00**	**11,49**	

7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	14,94	29.877.000	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	0	25,00	1,15	Palembang
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000	50,00	58,38	525.426.360	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00	0	50,00	10,34	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	38,25	76.505.590	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00		40,00	12,07	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Rp 1.250.000.000**	50,00	70,01	**525.104.092**	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	100,00	3 bulan	70,00	12,07	Palembang
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp 750.000.000	50,00	46,44	348.286.500	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		100,00		**0,00**	**3,45**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 200.000.000	50,00	25,35	50.698.000	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	30,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 300.000.000	50,00	42,04	126.119.592	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	50,00	3,45	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp 1.800.000.000**	50,00	72,30	**1.301.484.102**	Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		100,00		80,00		
14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 650.000.000	50,00	66,26	430.699.137	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	100,00	-	70,00	96,92	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 300.000.000	50,00	73,31	219.916.906	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	100,00	-	80,00	26,67	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang da	Rp 850.000.000	50,00	76,57	650.868.059	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	80,00	340,00	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Rp 750.000.000**	50,00	30,39	**227.905.821**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		100,00		**60,00**	**60,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 420.000.000**	50,00	33,18	**139.345.437**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		100,00	0	**40,00**	**22,53**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 200.000.000	50,00	25,54	51.084.400	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	100,00	0%	35,00	9,33	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 110.000.000	50,00	39,66	43.629.300	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	100,00	0%	40,00	5,87	Palembang

19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 110.000.000	50,00	40,57	44.631.737	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	100,00	0%	50,00	7,33	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 330.000.000**	50,00	26,84	**88.560.384**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		100,00		**35,00**	**15,40**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 110.000.000	50,00	20,31	22.343.600	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100,00	0	30,00	4,40	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 110.000.000	50,00	25,76	28.340.670	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	100,00	0	35,00	5,13	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp 110.000.000	50,00	34,43	37.876.114	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	100,00	0	40,00	5,87	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Rp 22.472.646.423**	50,00	91,92	**20.656.202.264**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		100,00		**100,00**	**100,00**	
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Rp 1.250.000.000**	50,00	54,34	679.209.858	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		100,00		**60,00**	**3,36**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp 650.000.000	50,00	68,64	446.185.551	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	70,00	2,02	75 Kecamatan di Prov.Sumsel
24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	Rp 600.000.000	50,00	38,84	233.024.307	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	100,00	0	50,00	1,33	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Rp 2.861.232.000**	50,00	62,05	1.775.354.544	Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan		100,00	0	60,00	8,37	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 1.210.000.000	50,00	58,50	707.834.348	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	60,00	3,23	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.651.232.000	50,00	64,65	1.067.520.196	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100,00	0	70,00	5,14	Kab/Kota di Prov.Sumsel

3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Rp 18.361.414.423**	50,00	99,13	**18.201.637.862**	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)		100,00		100,00	81,71	Palembang
27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	18.361.414.423,00	50,00	99,13	18.201.637.862,00	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	100,00	20%	100,00	81,71	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Rp 2.664.612.500**	50,00	38,69	**1.030.964.061**	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Rp 973.424.000**	50,00	25,78	**250.983.515**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		100,00		**35,00**	**12,29**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp 617.924.000	50,00	22,30	137.769.668	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	100,00	0	30,00	6,96	Palembang
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 355.500.000	50,00	31,85	113.213.847	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	100,00	0	40,00	5,34	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Rp 634.753.500**	50,00	46,10	**292.640.862**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		100,00		**50,00**	**4,66**	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	Rp 177.469.250	50,00	60,26	106.934.804	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	100,00	0	70,00	4,66	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	358.300.000	50,00	24,20	86.721.808	Jumlah dokumen data dan informasi tentang pertambahan dan lingkungan	1 dokumen 1 pameran	101,00	1	30,00	11,04	Palembang
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 98.984.250	50,00	100,00	98.984.250	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	100,00	0	100,00	10,17	Palembang
3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**Rp 1.056.435.000**	50,00	46,13	**487.339.684**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		100,00		**50,00**	**12,60**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp 200.000.000	50,00	52,56	105.125.827			100,00		**70,00**		
2	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Rp 184.950.000	50,00	39,94	73.873.977			100,00		**40,00**		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp 671.485.000	50,00	45,92	308.339.880	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD	1 Raperda 10 buku laporan	100,00	0	50,00	12,60	Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Rp 911.860.000**	50,00	48,04	**438.078.692**	Terlaksananya program penataan organisasi		100,00		**50,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Rp 310.000.000**	50,00	52,19	**161.780.300**	Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		100,00		**60,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	Rp 80.000.000	50,00	60,89	48.713.831	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	100,00	0	70,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	50,00	39,69	31.753.969	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	100,00	0	45,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	Rp 150.000.000	50,00	54,21	81.312.500	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	100,00	0	60,00		Palembang
2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**Rp 601.860.000**	50,00	45,91	**276.298.392**	Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		100,00		**50,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 110.000.000	50,00	38,12	41.935.883	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100,00	0	40,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 171.860.000	50,00	19,89	34.182.550	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	100,00	0	25,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 100.000.000	50,00	57,00	56.996.958	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	100,00	0	60,00		Palembang

39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp	120.000.000	50,00	65,61	78.735.069	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	100,00	0	75,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	100.000.000	50,00	64,45	64.447.932	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	100,00	0	75,00		49 PD per Kab/Kota
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Rp**	**279.235.990.895**	50,00	61,42	**171.494.555.233**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		100,00		**70,00**	**70,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp**	**736.744.400**	50,00	23,17	**170.738.639**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100,00		**50,00**	**0,10**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	212.600.000	50,00	12,93	27.478.550	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	25%	25,00	0,02	Palembang
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,96	38.484.850	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,97	38.489.450	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	38,96	15.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	66.000.000	50,00	50,74	33.485.604	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	100,00	0	70,00	0,02	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	304.144.400	50,00	5,85	17.800.185	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	100,00	0	25,00	0,03	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**71.751.231.968**	50,00	65,79	**47.208.692.463**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		100,00		**70,00**	**17,81**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	69.236.550.468	50,00	66,51	46.047.001.908	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	100,00	3 bulan	70,00	17,36	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	2.514.681.500	50,00	45,60	1.146.711.180,00	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	50,00	0,45	Palembang
52	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp	25.000.000	50,00	59,92	14.979.375	Honorarium verifikator keuangan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	60,00	2,04	Palembang
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	30.000.000	50,00	0,00	-	penyusunan laporan keu akhir tahun skpd	12 Dokumen	100,00	3 bulan	10,00	1,41	Palembang
54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	Rp	30.000.000	50,00	0,00	-	penyusunan laporan keu bulanan/semester	12 Dokumen	100,00	3 bulan	10,00	7,79	Palembang
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.880.000.000**	50,00	10,74	**201.891.000**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**		100,00		**25,00**	**0,10**	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1.650.000.000	50,00	6,02	99.356.100	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100,00	0	10,00	0,06	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	130.000.000	50,00	37,70	49.013.200	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	100,00	60%	40,00	0,02	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	100.000.000	50,00	53,52	53.521.700	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	100,00	0	60,00	0,02	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.894.816.986**	50,00	79,69	**1.509.934.756**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		100,00		**30,00**	**0,20**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	1.220.051.626	50,00	100,00	1.220.051.626	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	100,00	10%	25,00	0,11	Palembang

56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	100.000.000	50,00	48,96	48.962.130	Jumlah dokumen yang di update data kepegawaiannya di lingkup Setda Prov.Sumsel Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov.Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	60,00	0,02	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	423.765.360	50,00	39,03	165.391.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	100,00	0	25,00	0,04	Palembang
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	151.000.000	50,00	50,02	75.530.000	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	100,00	0	65,00	0,04	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**36.528.248.917**	50,00	44,39	**16.213.341.280**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		**50,00**	**168,55**	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	900.000.000	50,00	60,80	547.195.893	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	100,00	3 bulan	70,00	0,23	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	4.345.027.500	50,00	28,50	1.238.411.541	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	100,00	3 bulan	30,00	0,47	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	542.548.440	50,00	73,20	397.148.750	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100,00	0	80,00	0,16	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	16.949.200.000	50,00	48,34	8.193.529.105	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	100,00	3 bulan	50,00	3,03	Palembang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Rp	1.500.000.000	50,00	75,46	1.131.870.320	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	2 kegiatan	101,00	4 bulan	80,00	162,88	Palembang
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	11.891.472.977	50,00	37,83	4.498.082.121	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	100,00	10%	40,00	1,70	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	400.000.000	50,00	51,78	207.103.550	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	100,00	10%	60,00	0,09	Palembang
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Rp	98.801.100	50,00	0,00	-	Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Dokumen	101,00	10%	61,00	8,18	Palembang
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**Rp**	**20.693.992.150**	50,00	58,06	**12.014.488.500**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	100,00		75,00	13,76	Palembang
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	4.850.000.000	50,00	90,64	4.396.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	100,00	0	100,00	1,74	Palembang
70	Pengadaan Mebel	Rp	2.530.000.000	50,00	7,81	197.702.000	Pembelian Meubeler	20 Paket	100,00	10%	10,00	0,09	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	13.313.992.150	50,00	55,74	7.420.586.500	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	100,00	10%	70,00	3,34	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**47.999.264.100**	50,00	65,02	**31.208.659.765**		150 jenis	100,00	10%	50,00	8,59	Palembang
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	280.000.000	50,00	63,29	177.203.500	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	100,00	20%	75,00	18,47	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	11.550.000.000	50,00	68,91	7.959.433.105	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	100,00	20%	50,00	2,07	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	17.000.000.000	50,00	70,67	12.013.869.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,00	10%	75,00	4,57	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	19.169.264.100	50,00	57,69	11.058.153.960	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	100,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	50,00	3,43	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera**	**Rp**	**46.950.520.374**	50,00	55,39	**26.004.358.583**	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		**50,00**	8,41	Palembang
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan F	Rp	800.000.000	50,00	15,79	126.281.220	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	100,00	10	20,00	**13,46**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	12.983.074.300	50,00	38,58	5.008.674.700	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	100,00	10	40,00	1,86	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	Rp	800.000.000	50,00	93,27	746.131.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	100,00	10%	100,00	0,29	Palembang
80	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp	40.000.000	50,00	100,00	40.000.000	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Paket	101,00	10%	61,00	3,31	Palembang

82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	30.139.626.122	50,00	61,86	18.645.503.833	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	100,00	10	50,00	5,40	Palembang
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan	Rp	2.187.819.952	50,00	65,72	1.437.767.830	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	100,00	20	70,00	0,55	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepa**	**Rp**	**9.254.419.000**	50,00	64,77	**5.993.736.900**	Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		100,00	25%	60,00	1,99	Palembang
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	253.933.000	50,00	23,70	-	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		100,00		**70,00**	0,06	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.500.000.000	50,00	99,84	1.497.630.000	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	100,00	10	100,00	**5,60**	
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Rp	7.489.461.000	50,00	60,03	4.496.106.900	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	100,00	0	60,00	1,61	Palembang
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	11.025.000	50,00	0,00	-	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Rp**	**8.550.800.000**	50,00	70,30	**6.010.942.252**	Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah	1 kegiatan	100,00	0	70,00	2,14	Palembang
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp	7.350.800.000	50,00	72,78	5.350.068.652	Kebutuhan KDH	100%	100,00	10%	70,00	1,84	Palembang
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp	1.200.000.000	50,00	55,07	660.873.600	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	100,00	10%	60,00	0,26	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp**	**24.795.953.000**	50,00	81,10	**20.108.839.620**	Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100,00	10%	90,00	7,99	Palembang
91	Penyiapan Materi Pimpinan	Rp	2.400.000.000	50,00	71,27	1.710.368.234	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	100,00	25%	80,00	0,69	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp	2.837.000.000	50,00	88,39	2.507.508.810	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	20%	90,00	**9,18**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Rp	19.558.953.000	50,00	81,25	15.890.962.576	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	100,00	5%	90,00	6,30	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Rp**	**8.200.000.000**	50,00	59,13	**4.848.931.475**	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan		100,00		**60,00**	1,76	Palembang
94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Rp	5.200.000.000	50,00	58,59	3.046.629.255	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	30%	60,00	1,12	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	2.500.000.000	50,00	52,84	1.321.081.940	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	100,00	20%	60,00	**15,60**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Rp	500.000.000	50,00	96,24	481.220.280	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	100,00	0	100,00	0,18	Palembang

VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rp 36.302.934.200**	50,00	53,69	**19.489.769.296**	Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	100,00	0	60,00	7,80	Palembang
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Rp 35.466.934.200**	50,00	53,60	**19.009.367.263**	Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual		100,00		**60,00**	7,62	Palembang
97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp 17.825.000.000	50,00	55,40	9.875.000.000	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	29,46	Kab/Kota di Prov.Sumsel
97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp 17.641.934.200	50,00	51,78	9.134.367.263	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	29,16	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Rp 407.000.000**	50,00	50,06	**203.731.075**	Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar		100,00		**60,00**	**0,45**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp 77.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	100,00	0	0,00	0,00	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp 165.000.000	50,00	82,88	136.747.225	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	100,00	0,45	Palembang
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp 165.000.000	50,00	40,60	66.983.850			100,00		50		
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Rp 429.000.000**	50,00	64,49	**276.670.958**	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		100,00		**70,00**	**0,76**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 275.000.000	50,00	72,21	198.571.254	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	100,00	0	100,00	0,76	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	Rp 77.000.000		36,85	28.373.510	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100,00	0	50,00	y	Palembang
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Rp 77.000.000	50,00	64,58	49.726.194	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	100,00	0	70,00	0,30	
	Jumlah 103 Kegiatan	**Rp 348.599.408.018**		**62,13**	**Rp 216.568.142.825**					**72,00**		

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**1.911.364.000**	50,00	9,47	**181.076.733**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**716.214.805**	50,00	16,81	120.390.766	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		100,00		**25,00**	**9,62**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	247.015.210	50,00	10,54	26.042.575	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	100,00	-	25,00	3,23	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	70.000.000	50,00	30,08	21.057.397	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	100,00	-	40,00	1,46	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	115.000.000	50,00	12,69	14.590.000	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	100,00	-	20,00	1,20	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	284.199.595	50,00	20,65	58.700.794	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	100,00	-	25,00	3,72	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.195.149.195**	50,00	5,08	**60.685.967**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		100,00		**20,00**	**7,04**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.095.149.195	50,00	3,92	42.883.556	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	100,00	15%	10,00	5,73	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100.000.000	50,00	17,80	17.802.411	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	100,00	-	25,00	1,31	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN**	**4.350.000.000**	50,00	27,71	1.205.303.689	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**50,00**	**50,00**	

1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.300.000.000**	50,00	16,61	215.934.969	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**20,00**	**5,63**	
7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	4,27	8.549.000	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	0	10,00	0,46	Palembang
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000	50,00	17,31	155.760.979	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00	0	25,00	5,17	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	25,81	51.624.990	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00		30,00	8,62	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Rp 1.250.000.000**	50,00	49,67	372.542.160	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	100,00	3 bulan	50,00	8,62	Palembang
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp 750.000.000	50,00	36,72	275.374.080	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		100,00		**0,00**	**1,72**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 200.000.000	50,00	20,91	41.821.000	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	30,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 300.000.000	50,00	18,45	55.347.080	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	25,00	1,72	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp 1.800.000.000**	50,00	34,27	616.826.560	Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		100,00		40,00		

14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	650.000.000	50,00	43,10	280.152.791	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	100,00	-	50,00	69,23	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	300.000.000	50,00	12,87	38.622.605	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	100,00	-	25,00	8,33	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang d	Rp	850.000.000	50,00	35,06	298.051.164	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	40,00	170,00	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Rp**	**750.000.000**	50,00	9,22	**69.137.497**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**420.000.000**	50,00	10,26	**43.086.377**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		100,00	0	**12,00**	**7,80**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp	200.000.000	50,00	7,40	14.795.100	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	100,00	0%	10,00	2,67	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp	110.000.000	50,00	9,00	9.902.400	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	100,00	0%	10,00	1,47	Palembang
19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp	110.000.000	50,00	16,72	18.388.877	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	100,00	0%	25,00	3,67	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**330.000.000**	50,00	7,89	**26.051.120**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		100,00		**10,00**	**4,40**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp	110.000.000	50,00	8,37	9.209.600	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100,00	0	10,00	1,47	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	110.000.000	50,00	6,60	7.259.200	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	100,00	0	10,00	1,47	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp	110.000.000	50,00	8,71	9.582.320	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	100,00	0	10,00	1,47	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Rp**	**22.472.646.423**	50,00	6,00	**1.347.848.762**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Rp**	**1.250.000.000**	50,00	29,48	368.472.894	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		100,00		**50,00**	**2,78**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp	650.000.000	50,00	32,19	209.223.182	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	50,00	1,45	75 Kecamatan di Prov.Sumsel

24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	Rp 600.000.000	50,00	26,54	159.249.712	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	100,00	0	50,00	1,33	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Rp 2.861.232.000**	50,00	18,64	533.380.597	Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan		100,00	0	50,00	5,36	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 1.210.000.000	50,00	15,83	191.501.813	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	45,00	2,42	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.651.232.000	50,00	20,70	341.878.784	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100,00	0	40,00	2,94	Kab/Kota di Prov.Sumsel
3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Rp 18.361.414.423**	50,00	2,43	**445.995.271**	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)		100,00		10,00	8,17	Palembang
27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	18.361.414.423,00	50,00	2,43	445.995.271,00	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	100,00	20%	10,00	8,17	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Rp 2.664.612.500**	50,00	17,95	478.301.257	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		100,00		**35,00**	**35,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Rp 973.424.000**	50,00	2,61	25.450.840	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		100,00		**10,00**	**2,99**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp 617.924.000	50,00	3,45	21.323.840	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	100,00	0	10,00	2,32	Palembang
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 355.500.000	50,00	1,16	4.127.000	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	100,00	0	5,00	0,67	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Rp 634.753.500**	50,00	27,42	174.054.842	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		100,00		**30,00**	**1,67**	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	Rp 177.469.250	50,00	17,63	31.280.484	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	100,00	0	25,00	1,67	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	358.300.000	50,00	12,22	43.790.108	Jumlah dokumen data dan informasi tentang pertambahan dan lingkungan	1 dokumen 1 pameran	101,00	1	26,00	9,57	Palembang

32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp	98.984.250	50,00	100,00	98.984.250	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	100,00	0	100,00	10,17	Palembang
3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**Rp**	**1.056.435.000**	50,00	26,39	278.795.575	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		100,00		**30,00**	**7,56**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp	200.000.000	50,00	19,84	39.679.374			100,00		**25,00**		
2	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Rp	184.950.000	50,00	22,08	40.844.477			100,00		**25,00**		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp	671.485.000	50,00	29,53	198.271.724	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD	1 Raperda 10 buku laporan	100,00	0	30,00	7,56	Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Rp**	**911.860.000**	50,00	20,86	190.218.953	Terlaksananya program penataan organisasi		100,00		**50,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Rp**	**310.000.000**	50,00	13,62	42.231.690	Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		100,00		**20,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	Rp	80.000.000	50,00	17,77	14.215.657	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	100,00	0	20,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp	80.000.000	50,00	24,28	19.423.833	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	100,00	0	25,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	Rp	150.000.000	50,00	5,73	8.592.200	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	100,00	0	10,00		Palembang
2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**Rp**	**601.860.000**	50,00	24,59	147.987.263	Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		100,00		**25,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp	110.000.000	50,00	14,16	15.571.150	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100,00	0	20,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp	171.860.000	50,00	11,64	20.011.150	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	100,00	0	20,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp	100.000.000	50,00	48,03	48.026.958	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	100,00	0	50,00		Palembang
39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp	120.000.000	50,00	18,75	22.503.009	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	100,00	0	25,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	100.000.000	50,00	41,87	41.874.996	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	100,00	0	50,00		49 PD per Kab/Kota
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Rp**	**279.235.990.895**	50,00	37,78	105.485.042.780	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		100,00		**60,00**	**60,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp**	**736.744.400**	50,00	19,57	**144.148.454**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100,00		**25,00**	**0,09**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	212.600.000	50,00	8,79	18.688.550	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	25%	25,00	0,02	Palembang

42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,96	38.484.850	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	99,97	38.489.450	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	50,00	38,96	15.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	66.000.000	50,00	50,74	33.485.604	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	100,00	0	40,00	0,01	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	304.144.400	50,00	0,00	-	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	100,00	0	25,00	0,03	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**71.751.231.968**	50,00	45,57	**32.699.960.710**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		100,00		**0,00**	**12,58**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	69.236.550.468	50,00	46,67	32.315.139.530	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	100,00	3 bulan	50,00	12,40	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	2.514.681.500	50,00	13,61	342.321.180,00	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	20,00	0,18	Palembang
52	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp	25.000.000	50,00	50,00	12.500.000	Honorarium verifikator keuangan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	50,00	1,70	Palembang
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	30.000.000	50,00	50,00	15.000.000	penyusunan laporan keu akhir tahun skpd	12 Dokumen	100,00	3 bulan	50,00	7,06	Palembang
54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesterar	Rp	30.000.000	50,00	50,00	15.000.000	penyusunan laporan keu bulanan/semester	12 Dokumen	100,00	3 bulan	5,00	3,90	Palembang
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.880.000.000**	50,00	2,61	**49.013.200**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**		100,00		**10,00**	**0,02**	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1.650.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	130.000.000	50,00	37,70	49.013.200	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	100,00	60%	50,00	0,02	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	100.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.894.816.986**	50,00	5,22	**98.836.000**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		100,00		**0,00**	**0,06**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	1.220.051.626	50,00	0,00	-	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	100,00	10%	0,00	0,00	Palembang
56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	100.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah dokumen yang di update data kepegawaiannya di lingkup Setda Prov.Sumsel Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov.Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	423.765.360	50,00	10,92	46.286.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	100,00	0	20,00	0,03	Palembang
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	151.000.000	50,00	34,80	52.550.000	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	100,00	0	50,00	0,03	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**36.528.248.917**	50,00	23,32	**8.519.799.797**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		**30,00**	**66,31**	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	900.000.000	50,00	41,13	370.132.059	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	100,00	3 bulan	50,00	0,16	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	4.345.027.500	50,00	9,93	431.589.353	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	100,00	3 bulan	10,00	0,16	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	542.548.440	50,00	143,26	777.269.250	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100,00	0	60,00	0,12	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	16.949.200.000	50,00	28,17	4.774.565.683	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	100,00	3 bulan	30,00	1,82	Palembang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Rp	1.500.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	2 kegiatan	101,00	4 bulan	31,00	63,12	Palembang

66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	11.891.472.977	50,00	16,48	1.959.139.902	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	100,00	10%	20,00	0,85	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	400.000.000	50,00	51,78	207.103.550	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	100,00	10%	60,00	0,09	Palembang
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Rp	98.801.100	50,00	0,00	-	Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Dokumen	101,00	10%	61,00	8,18	Palembang
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**Rp**	**20.693.992.150**	50,00	46,58	**9.638.813.000**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	100,00		50,00	12,81	Palembang
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	4.850.000.000	50,00	90,64	4.396.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	100,00	0	100,00	1,74	Palembang
70	Pengadaan Mebel	Rp	2.530.000.000	50,00	7,81	197.702.000	Pembelian Meubeler	20 Paket	100,00	10%	10,00	0,09	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	13.313.992.150	50,00	37,89	5.044.911.000	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	100,00	10%	50,00	2,38	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**47.999.264.100**	50,00	36,39	**17.468.163.836**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	150 jenis	100,00	10%	50,00	8,59	Palembang
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	280.000.000	50,00	18,68	52.292.500	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	100,00	20%	30,00	10,20	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	11.550.000.000	50,00	26,67	3.080.660.462	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	100,00	20%	30,00	1,24	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	17.000.000.000	50,00	40,77	6.930.445.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,00	10%	50,00	3,04	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	19.169.264.100	50,00	38,63	7.404.765.674	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	100,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	25,00	1,72	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera**	**Rp**	**46.950.520.374**	50,00	21,03	**9.872.943.060**	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		**25,00**	4,20	Palembang
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan F	Rp	800.000.000	50,00	3,48	27.810.000	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	100,00	10	10,00	**9,49**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	12.983.074.300	50,00	19,28	2.503.473.575	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	100,00	10	20,00	0,93	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	Rp	800.000.000	50,00	52,71	421.692.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	100,00	10%	60,00	0,17	Palembang
80	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp	40.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Paket	101,00	10%	61,00	3,31	Palembang
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	30.139.626.122	50,00	20,18	6.082.163.500	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	100,00	10	25,00	2,70	Palembang
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan	Rp	2.187.819.952	50,00	38,29	837.803.985	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	100,00	20	50,00	0,39	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepa**	**Rp**	**9.254.419.000**	50,00	52,45	**4.854.171.600**	Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		100,00	25%	60,00	1,99	Palembang
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	253.933.000	50,00	0,00	-	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		100,00		**0,00**	0,00	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.500.000.000	50,00	45,78	686.740.000	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	100,00	10	50,00	**4,46**	
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Rp	7.489.461.000	50,00	55,64	4.167.431.600	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	100,00	0	60,00	1,61	Palembang

87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 11.025.000	50,00	0,00	-	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Rp 8.550.800.000**	50,00	37,91	**3.241.537.136**	Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah	1 kegiatan	100,00	0	50,00	1,53	Palembang
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 7.350.800.000	50,00	39,91	2.933.644.536	Kebutuhan KDH	100%	100,00	10%	50,00	1,32	Palembang
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp 1.200.000.000	50,00	25,66	307.892.600	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	100,00	10%	40,00	0,17	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp 24.795.953.000**	50,00	64,19	**15.916.867.747**	Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100,00	10%	70,00	6,22	Palembang
91	Penyiapan Materi Pimpinan	Rp 2.400.000.000	50,00	38,12	914.936.160	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	100,00	25%	40,00	0,34	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 2.837.000.000	50,00	40,62	1.152.258.369	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	20%	50,00	**6,99**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Rp 19.558.953.000	50,00	70,81	13.849.673.218	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	100,00	5%	75,00	5,25	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Rp 8.200.000.000**	50,00	36,35	**2.980.788.240**	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan		100,00		**40,00**	1,17	Palembang
94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Rp 5.200.000.000	50,00	28,35	1.474.064.283	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	30%	30,00	0,56	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.500.000.000	50,00	44,10	1.102.519.390	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	100,00	20%	50,00	**6,68**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Rp 500.000.000	50,00	80,84	404.204.567	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	100,00	0	100,00	0,18	Palembang
VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rp 36.302.934.200**	50,00	25,28	9.178.435.959	Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	100,00	0	50,00	6,50	Palembang
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Rp 35.466.934.200**	50,00	25,52	9.049.698.484	Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual		100,00		**0,00**	0,00	Palembang
97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp 17.825.000.000	50,00	34,36	6.125.000.000	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	100,00	0	40,00	19,64	Kab/Kota di Prov.Sumsel

97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp 17.641.934.200	50,00	16,58	2.924.698.484	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	20,00	9,72	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Rp 407.000.000**	50,00	22,67	**92.257.475**	Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar		100,00		**50,00**	**0,27**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp 77.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	100,00	0	0,00	0,00	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp 165.000.000	50,00	55,91	92.257.475	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	0,27	Palembang
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp 165.000.000	50,00	0,00	-			100,00				
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Rp 429.000.000**	50,00	8,50	**36.480.000**	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		100,00		**10,00**	**0,19**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 275.000.000	50,00	13,27	36.480.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	100,00	0	25,00	0,19	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	Rp 77.000.000		0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Rp 77.000.000	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	
	Jumlah 103 Kegiatan	**Rp 348.599.408.018**		**33,89**	**Rp 118.135.365.630**					**49,38**		

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.075.364.000**	30,00	4,04	**83.880.986**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**716.214.805**	30,00	0,00	-	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	247.015.210	30,00	0,00	-	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	70.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	115.000.000	30,00	0,00	-	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	284.199.595	30,00	0,00	-	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.359.149.195**	30,00	6,17	**83.880.986**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		30,00		**0,00**	**9,10**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.259.149.195	30,00	6,66	83.880.986	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	30,00	15%	15,00	9,10	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	30,00	-	0,00	0,00	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN**	**4.350.000.000**	30,00	4,72	205.463.176	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		30,00		**0,00**	**0,00**	

1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.300.000.000**	30,00	14,87	193.307.000	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		30,00		**0,00**	**0,23**	
7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	0	5,00	0,23	Palembang
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000	30,00	5,39	48.507.200	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	200.000.000	30,00	7,36	14.711.300	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	30,00		0,00	8,62	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Rp 1.250.000.000**	30,00	0,00	-	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	30,00	3 bulan	50,00	8,62	Palembang
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp 750.000.000	30,00	23,48	46.960.000	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		30,00		**0,00**	**0,00**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 200.000.000	30,00	6,64	19.910.000	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	-	0,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 300.000.000	30,00	21,07	63.218.500	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	-	0,00	0,00	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp 1.800.000.000**	30,00	0,68	12.156.176	Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		30,00				

14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	650.000.000	30,00	11,42	74.250.012	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	30,00	-	1,00	1,38	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	300.000.000	30,00	6,82	20.467.605	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	30,00	-	3,00	1,00	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan B	Rp	850.000.000	30,00	12,45	105.855.243	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	-	4,00	17,00	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Rp**	**750.000.000**	30,00	4,57	**34.280.800**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**420.000.000**	30,00	4,06	**17.042.400**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		30,00	0	**0,00**	**0,00**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp	200.000.000	30,00	3,73	7.455.100	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	30,00	0%	0,00	0,00	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp	110.000.000	30,00	4,54	4.996.400	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	30,00	0%	0,00	0,00	Palembang
19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp	110.000.000	30,00	4,17	4.590.900	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	30,00	0%	0,00	0,00	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**330.000.000**	30,00	5,22	**17.238.400**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp	110.000.000	30,00	4,54	4.989.600	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	110.000.000	30,00	6,60	7.259.200	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp	110.000.000	30,00	4,54	4.989.600	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Rp**	**30.918.233.450**	30,00	0,58	**180.029.729**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Rp**	**850.000.000**	30,00	0,00	-	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		30,00		**0,00**	**0,49**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp	450.000.000	30,00	11,44	51.493.440	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	30,00	0	25,00	0,36	75 Kecamatan di Prov.Sumsel

24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	Rp 400.000.000	30,00	13,93	55.733.724	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	30,00	0	10,00	0,13	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Rp 1.729.382.000**	30,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan		30,00	0	0,00	0,83	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 600.000.000	30,00	16,69	100.115.821	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	30,00	0	5,00	0,10	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.129.382.000	30,00	24,96	281.917.153	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	30,00	0	20,00	0,73	Kab/Kota di Prov.Sumsel
3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Rp 28.338.851.450**	30,00	0,64	**180.029.729**	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)		30,00		0,00	1,83	Palembang
27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Rp 28.338.851.450	30,00	0,64	180.029.729	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	30,00	20%	2,00	1,83	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Rp 1.694.143.250**	30,00	0,00	-	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Rp 973.424.000**	30,00	0,00	-	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		30,00		**0,00**	**2,87**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp 617.924.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	30,00	0	5,00	1,82	Palembang
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 355.500.000	30,00	0,00	-	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	30,00	0	5,00	1,05	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Rp 535.769.250**	30,00	6,53	34.976.135	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		30,00		**0,00**	**0,21**	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	Rp 177.469.250	30,00	2,82	5.000.000	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	30,00	0	2,00	0,21	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 358.300.000	30,00	8,37	29.976.135	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	30,00	0	3,00	1,10	Palembang

3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**Rp**	**184.950.000**	30,00	6,48	11.982.700	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		30,00		**0,00**	**0,55**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp	200.000.000	30,00	5,97	11.946.659			30,00				
2	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Rp	514.975.000	30,00	2,54	13.083.029			30,00				
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp	184.950.000	30,00	6,48	11.982.700	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD	1 Raperda 10 buku laporan	30,00	0	5,00	0,55	Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Rp**	**911.860.000**	30,00	0,00	-	Terlaksananya program penataan organisasi		30,00		**0,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Rp**	**310.000.000**	30,00	9,03	27.996.217	Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		30,00		**0,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	Rp	80.000.000	30,00	24,19	19.355.937	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	30,00	0	0,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp	80.000.000	30,00	10,80	8.640.280	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	30,00	0	0,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	Rp	150.000.000	30,00	0,00	-	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	30,00	0	0,00		Palembang
2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**Rp**	**601.860.000**	30,00	12,06	72.570.090	Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		30,00		**0,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp	110.000.000	30,00	8,41	9.247.700	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	30,00	0	0,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp	171.860.000	30,00	11,64	20.011.150	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	30,00	0	0,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp	100.000.000	30,00	20,84	20.838.234	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	30,00	0	0,00		Palembang
39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp	120.000.000	30,00	0,00	-	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	30,00	0	0,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	100.000.000	30,00	22,47	22.473.006	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	30,00	0	0,00		49 PD per Kab/Kota
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Rp**	**317.657.514.770**	30,00		37.640.295.029	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Da**	**Rp**	**833.665.360**	30,00	13,03	**108.648.454**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		30,00		**0,00**	**0,09**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	93.800.000	30,00	19,92	18.688.550	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,00	25%	25,00	0,01	Palembang
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	38.500.000	30,00	99,96	38.484.850	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	30,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	38.500.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	30,00	0	25,00	0,00	Palembang

44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	30,00	99,97	38.489.450	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	30,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	38.500.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	30,00	0	25,00	0,00	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	66.000.000	30,00	19,68	12.985.604	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	30,00	0	40,00	0,01	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	519.865.360	30,00	0,00	-	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	30,00	0	25,00	0,04	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**112.778.561.000**	30,00	6,44	**7.262.633.528**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		30,00		**0,00**	**0,04**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	69.195.442.000	30,00	10,50	7.262.633.528	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
49	Belanja Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2.501.881.500	30,00	0,00	-	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12 bulan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
50	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	41.063.520.000	30,00	12,92	5.305.578.052,00	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	12 bulan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	2.519.599.000	30,00	0,00		Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	30,00	3 bulan	5,00	0,04	Palembang
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.880.000.000**	30,00	0,00	-	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**		30,00		**0,00**	**0,00**	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1.650.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SK	Rp	130.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	30,00	60%	0,00	0,00	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	100.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.641.316.986**	30,00	1,07	**17.550.000**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		30,00		**0,00**	**0,00**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	976.551.626	30,00	0,00	-	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	120.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah dokumen yang di update data kepegawaiannya di lingkup Setda Prov.Sumsel Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov.Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	423.765.360	30,00	0,00	-	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	121.000.000	30,00	14,50	17.550.000	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**36.689.581.900**	30,00	6,17	**2.263.113.234**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		30,00		**0,00**	**0,33**	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kant	Rp	900.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	30,00	3 bulan	5,00	0,01	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	4.345.027.500	30,00	1,49	64.577.570	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	500.000.000	30,00	39,79	198.972.250	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	19.000.000.000	30,00	4,30	817.441.414	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	30,00	3 bulan	5,00	0,30	Palembang
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	11.544.554.400	30,00	8,58	990.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	30,00	10%	0,00	0,00	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	400.000.000	30,00	48,03	192.122.000	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	30,00	10%	10,00	0,01	Palembang

6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Rp**	**20.643.992.150**	30,00	38,34	**7.915.416.000**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	30,00		0,00	0,00	Palembang
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	4.800.000.000	30,00	91,59	4.396.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
70	Pengadaan Mebel	Rp	2.530.000.000	30,00	0,00		Pembelian Meubeler	20 Paket	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan L	Rp	13.313.992.150	30,00	26,43	3.519.216.000	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**47.320.505.000**	30,00	12,96	**6.131.207.335**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	150 jenis	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	200.000.000	30,00	20,00	40.000.000	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	30,00	20%	0,00	2,23	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	10.850.000.000	30,00	11,82	1.282.280.935	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	30,00	20%	25,00	0,85	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	17.000.000.000	30,00	16,31	2.772.000.400	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30,00	10%	20,00	1,07	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	19.270.505.000	30,00	10,57	2.036.926.000	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	30,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	5,00	0,30	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta**	**Rp**	**46.619.520.374**	30,00	9,20	**4.291.129.612**	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ken	Rp	800.000.000	30,00	3,48	27.810.000	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	30,00	10	20,00	**1,37**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	12.983.074.300	30,00	1,46	189.029.575	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	30,00	10	15,00	0,61	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	Rp	800.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	30,00	10%	10,00	0,03	Palembang
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	30.064.626.122	30,00	12,29	3.695.551.787	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	30,00	10	0,00	0,00	Palembang
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Ba	Rp	1.971.819.952	30,00	19,21	378.738.250	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	30,00	20	0,00	0,00	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wa**	**Rp**	**9.254.419.000**	30,00	21,93	**2.029.536.000**	Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		30,00	25%	25,00	0,73	Palembang
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala D	Rp	253.933.000	30,00	0,00	-	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.500.000.000	30,00	13,27	198.990.000	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	30,00	10	0,00	**0,00**	
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Rp	7.489.461.000	30,00	24,44	1.830.546.000	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala D	Rp	11.025.000	30,00	0,00	-	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Rp**	**7.000.000.000**	30,00	16,30	**1.140.918.800**	Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah	1 kegiatan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp	6.000.000.000	30,00	14,81	888.899.800	Kebutuhan KDH	100%	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp	1.000.000.000	30,00	25,20	252.019.000	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp**	**24.795.953.000**	30,00	22,40	**5.554.572.316**	Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang

91	Penyiapan Materi Pimpinan	Rp	2.400.000.000	30,00	18,66	447.797.910	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	30,00	25%	0,00	0,00	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp	2.837.000.000	30,00	9,13	259.000.000	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	30,00	20%	0,00	**0,00**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Rp	19.558.953.000	30,00	24,79	4.847.774.406	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	30,00	5%	0,00	0,00	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Rp**	**8.200.000.000**	30,00	11,29	**925.569.750**	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Rp	5.200.000.000	30,00	8,28	430.403.000	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	30,00	30%	0,00	0,00	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	2.500.000.000	30,00	19,81	495.166.750	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	30,00	20%	0,00	**0,00**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Rp	500.000.000	30,00	0,00	-	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rp**	**36.302.934.200**	30,00	0,00	-	Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Rp**	**35.466.934.200**	30,00	0,00	-	Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp	17.825.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	Kab/Kota di Prov.Sumsel
97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp	17.641.934.200	30,00	0,00	-	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasa**	**Rp**	**407.000.000**	30,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar		30,00		**0,00**	**0,00**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp	77.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp	165.000.000	30,00	0,00	-	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	Palembang

100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp 165.000.000	30,00	0,00	-			30,00				
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan**	**Rp 429.000.000**	30,00	0,00	-	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		30,00		**0,00**	**0,00**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 275.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	Rp 77.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Rp 77.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
	Jumlah 103 Kegiatan	**Rp 394.660.049.670**		**9,67**	**Rp 38.143.949.720**							